PERBEDAAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT

Revaldo Rhenfi

Email : revaldorhenfi18@gmail.com
No. BP : 2010003600216

UNIVERSITAS EKASAKTI
PADANG

A. PENDAHULUAN

Perbedaan Hukum Publik Dan Hukum Privat, Tentu kita sudah tahu bahwa Negara Indonesia kita ini merupakan negara hukum. Nah dengan adanya hukum disuatu negara, diharapkan negara tersebut dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada warga negaranya maupun negaranya tersebut. Tapi tahukah anda bahwa hukum juga dapat dibedakan menjadi hukum publik dan privat, maka disini kami akan menjabarkan mengenai hukum publik dan hukum privat secara rinci dan jelas.

B. PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Publik

Suatu hukum dimana mengatur hubungan antara warga negara di Negara tertentu dimana berhubungan dengan negara serta alat perlengkapan mengatur Negara disebut dengan hukum publik.

Hukum publik diartikan secara global karena mengatur kepentingan – kepentingan umum, artinya mengatur korelasi antara warga negara dengan negara dimana dapat dikatakan hukum yang mengatur kepentingan umum warganya.

Jenis Hukum Publik

Terdapat 4 jenis dalam hukum publik ini, ialah sebagai berikut :

1. Hukum Administrasi Negara

Suatu hukum dimana mengatur mengenai sejumlah tata cara pelaksanaan tugas sebagai contoh hak serta kewajiban terhadap sejumlah kekuasaan alat beserta dengan perlengkapan negara tersebut.

2. Hukum Internasional

Hukum ini terbagi lagi menjadi 2 bentuk, ialah sebagai berikut :

- **Hukum Publik Internasional**, adalah suatu hukum dimana mengatur hubungan antara satu negara terhadap negara lain dimana berkaitan dengan hubungan internasional.

- **Hukum Perdata Internasional**, adalah suatu hukum dimana mengatur antara warga negara di sebuah negara terhadap warga negara di negara lain dimana hal ini terkait dengan hubungan internasional.

3. Hukum Pidana

Suatu hukum dimana mengatur tentang mengenai adanya pelanggaran maupun kejahatan dimana berkaitan terhadap kepentingan umum disebut juga hukum pidana.

4. Hukum Tata Negara

Suatu hukum dimana mengatur seluruh hal yang berkaitan terhadap negara disebut dengan hukum tata Negara. Sebagai contoh adanya dasar pendirian sebuah negara, terbentuknya lembaga – lembaga negara, terbentuknya struktur kelembagaan, hubungan hak serta kewajiban terhadap hukum, dan yang lainnya.

Pengertian Hukum Privat

Suatu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu terhadap individu yang lain, dimana hal ini berfokus pada kepentingan perorangan disebut dengan hukum privat.

Jenis Hukum Privat

Pada hukum ini terdapat 2 jenis didalamnya, ialah sebagai berikut :

1. Hukum Perdata

Sekumpulan hukum dimana mengatur hubungan seseorang terhadap orang lain yang memfokuskan adanya kepentingan perseorangan disebut dengan hukum perdata.

2. Hukum Dagang

Suatu peraturan – peraturan hukum dimana berkaitan dengan adanya perdagangan disebut dengan hukum datang. Tidak hanya ini saja hukum privat lain seperti hukum keluarga, perkawinan, kekayaan, waris harta benda dan lainnya.

PERSAMAAN

Hukum Publik dan hukum privat memiliki beberapa persamaan, yaitu:

- Mempunyai sanksi hukum dimana biasa diterapkan bagi setiap pelanggarannya.
- Menjadikan peraturan hukum untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri.

PERBEDAAN

Disamping memiliki persamaan tentu memiliki perbedaan antara keduanya, berikut tabel yang telah kami sajikan mengenai perbedaan antara keduanya ialah :

PERBEDAAN	Hukum Publik	Hukum Privat
Pengertian	Suatu Hukum dimana mengatur hubungan antara warga negara di negara tertentu, dimana berhubungan dengan negara serta alat perlengkapan mengatur Negara disebut Hukum Publik.	Suatu Hukum yang mengatur hubungan antara individu satu terhadap individu yang lain, dimana hal ini berfokus pada kepentingan perorangan disebut Hukum Privat.
Fokus Pengkajian	Fokus terhadap masalah kemaslahatan ataupun manfaat.	Cendrung fokus terhadap masalah hubungan pribadi ataupun individu
Ruang Lingkup (cakupan)	Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Internasional.	Hukum Perdata, Hukum dagang.
Pertahanan Hukum	Hukum Publik dipertahankan oleh negara serta pemerintah dimana bersifat aktif.	Hukum Privat dipertahankan oleh individu serta pemerintah dimana bersifat pasif.
Tuntutan Untuk Pelanggar	Tuntutan diberikan oleh jaksa.	Tuntutan diberikan oleh pihak yang menggugat atau penggugat.

C. PENUTUP

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya masalah kemaslahatan, artinya jika ada seseorang dimana mendapat amanat akan kepentingan banyak orang maka orang tersebut harus bisa melindunginya dan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya, sehingga tidak semena-mena dalam wewenang yang telah diberikan disebut juga hukum publik.

Sebaliknya sifat cenderung terhadap masalah hubungan pribadi mau individu, dimana tentunya mempunyai akibat namun tidak berpengaruh pada orang lain, sebagai contoh : warisan, perkawinan, serta lainnya.

Apa yang dimaksud hukum publik ?

Suatu hukum dimana mengatur hubungan antara warga negara di Negara tertentu dimana berhubungan dengan negara serta alat perlengkapan mengatur Negara disebut dengan hukum publik.

Apa yang dimaksud hukum privat ?

Suatu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu terhadap individu yang lain, dimana hal ini berfokuskan pada kepentingan perorangan disebut dengan hukum privat.

Apakah 3 fungsi adanya hukum ?

1. Dengan adanya hukum, maka berfungsi sebagai alat bagi ketertiban serta keteraturan masyarakat.

2. Dengan adanya hukum, maka berfungsi agar melindungi segala kepentingan manusia
3. Dengan adanya hukum, maka berfungsi untuk alat adanya perubahan social maupun perkembangan pembangunan.

Demikianlah pembahasan artikel Perbedaan Hukum Publik Dan Hukum Privat kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan baru bagi kalian semua, khususnya para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia*, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.
- Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020